

Analisis Gambaran Kondisi Pembangunan Dalam Film "13 Bom di Jakarta" : Tinjauan Keterbelakangan Pembangunan

Robby Dwi Widiyanto
Universitas Jember

Yoga Septa Nurivandi
Universitas Jember

Muhamad Feri Herdiansyah
Universitas Jember

Alamat: Jl. Kalimantan Tegal BotoNo.37, Krajan Timur, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember
Korespondensi penulis: : robby.dwi297@gmail.com*

Abstract. *This research focuses on analyzing the depiction of development in the film "13 Bombs in Jakarta". The act of rebellion through bomb terror carried out by a terrorist group depicts a social setting that describes the development conditions in that place. Andre Gunder Frank's theory is used as an analytical tool in describing the social setting in the film. In the realization of development carried out as an effort to improve social welfare, quality of life and eradicate poverty, the government plays a very important role in realizing this dream. The policies created should provide benefits to the communities targeted by these targets. If there is a discrepancy between policies and the benefits received, an attitude of distrust from the public will arise. There could even be acts of terror as a form of public dissatisfaction. The research method in this paper uses a descriptive qualitative method. Data collection is divided into two types, namely primary data and secondary data. The purpose of this paper is to analyze the conditions in the development context in the film "13 Bombs in Jakarta".*

Keywords: *Rebellion, Development, Government.*

Abstrak Riset ini berfokus pada analisis gambaran pembangunan pada Film "13 Bom di Jakarta". Aksi pemberontakan lewat teror bom yang dilakukan oleh kelompok terorisme menggambarkan suatu setting sosial yang menggambarkan kondisi pembangunan di latar tempat tersebut. Teori Andre Gunder Frank digunakan sebagai pisau analisis dalam menguraikan setting sosial yang ada pada film. Dalam realisasi pembangunan yang dilakukan sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kualitas hidup, dan pengentasan kemiskinan, pemerintah memainkan peranan yang sangat penting untuk mewujudkan impian tersebut. kebijakan-kebijakan yang diciptakan seyogyanya memberikan manfaat bagi masyarakat yang dijadikan sasaran dari sasaran tersebut. apabila terdapat ketimpangan antara kebijakan dengan manfaat yang diterima, sikap tidak percaya dari masyarakat akan timbul. Bahkan bisa saja terjadi aksi teror sebagai bentuk ketiakpuasan masyarakat. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif jenis deskriptif. Pengumpulan data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Tujuan tulisan ini untuk menganalisis bagaimana kondisi dalam konteks pembangunan yang ada pada film "13 Bom di jakarta".

Kata kunci: Pemberontakan, Pembangunan, Pemerintah.

PENDAHULUAN

Secara umum, pembangunan merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kualitas hidup manusia, dan pengentasan kemiskinan. Usaha tersebut dilakukan untuk memajukan kehidupan masyarakat. Namun, seringkali kemajuan dianggap sebagai berkembangnya hal-hal yang sifatnya material. Padahal terdapat hal-hal yang sifatnya non-material yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu proses pembangunan. Pembangunan

merupakan suatu program yang selalu diupayakan baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Sektor pembangunan yang sarat akan maju tidaknya suatu negara menjadi salah satu faktor mengapa pembangunan dianggap hal yang penting di tiap-tiap negara. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, pembangunan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi peningkatan kualitas hidup manusia dan pengentasan kemiskinan. Menurut Arief Budiman (2000), terdapat lima hal yang menjadi tolak ukur pembangunan dalam suatu negara, (1) kekayaan rata-rata, (2) pemerataan kekayaan, (3) kualitas kehidupan, (4) kerusakan lingkungan, (5) keadilan sosial dan kesinambungan. Tolak ukur diatas yang dikemukakan oleh Arief Budiman dapat dijadikan acuan penentu bagaimana kondisi atau perkembangan pembangunan di suatu negara. Asumsinya, semakin baik pembangunan di suatu negara, maka negara tersebut dianggap lebih maju.

Pemerintah sebagai *stakeholder* menjadi salah satu penentu utama dalam proses pembangunan. Peran pemerintah baik eksekutif maupun yudikatif merupakan hal yang krusial dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan atau program yang diciptakan oleh pemerintah. Apabila diamati lebih jauh, peran pemerintah juga memengaruhi peran dari individu-individu yang nantinya menjadi aktor pembangunan itu sendiri. Masyarakat dalam kegiatan produksi dan konsumsinya sedikit banyak terpengaruh oleh kebijakan yang diciptakan oleh penguasa. Para birokrasi pemerintahan yang telah dipercaya dituntut untuk mengatasi masalah-masalah tentang ekonomi seperti kemiskinan, pengadaan lapangan pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain.

Tulisan ini membahas mengenai Film "13 Bom di Jakarta" dan kaitannya dengan pembangunan. Setting sosial dalam film tersebut menjelaskan bahwa terlantarnya masyarakat kalangan bawah dalam aspek ekonomi. Terdapat salah satu kelompok dimana ia memberontak dan melakukan teror terhadap pemerintah dengan cara meledekan bom di beberapa lokasi strategis dan akses publik, yaitu antaranya Bandara, kereta *MRT*, dan mobil pengangkut uang. Pengeboman ini dilakukan sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem keuangan konvensional yang korup. Kelompok ini beragumen bahwa banyak orang yang meninggal karena sengaja dimiskinkan secara sistemik, hal ini dapat dilihat dari ketidaktersediaan fasilitas kesehatan atau pendidikan pada daerah terpencil yang dimana hal tersebut merupakan salah satu kewajiban negara. Tindakan terorisme ini merupakan aksi pemberontakan oleh suatu kelompok yang disebabkan oleh bobroknya pemerintahan dalam mengelola negara. Hal ini juga didukung oleh pengalaman pribadi si pelaku yang dimana istrinya meninggal karena depresi akan tuntutan sistem perbankan yang tidak wajar. Berdasarkan paparan diatas, hal tersebut dapat dikaitkan dengan istilah "*kretinisme*" yang

dinyatakan oleh Paul Baran. Baran dalam Budiman (2000) menyebut kretinisme sebagai penyakit seseorang yang dimana orang tersebut tetap kerdil dan tidak bisa besar. Maksud dari pernyataan tersebut adalah, meskipun seseorang berusaha untuk menjadi besar dan mengembangkan dirinya, terdapat suatu kesengajaan dari faktor eksternal yang secara tidak langsung mendorong dirinya untuk tidak maju.

Berdasarkan paparan sebelumnya, kami akan mengaitkannya dengan teori ketergantungan sebagai pisau analisis dalam menguraikan pembangunan yang terjadi dalam setting sosial yang dipertontonkan dalam Film “13 Bom di Jakarta”. Andre Gunder Frank merupakan salah satu tokoh teori ketergantungan yang berargumen bahwa keterbelakangan negara dunia ketiga disebabkan oleh sistem kapitalisme baik dalam lingkup global maupun lokal. Hal ini relevan dengan film yang akan kami analisis berdasarkan konteks pembangunannya. Tujuan dari tulisan ini untuk menguraikan bagaimana gambaran pembangunan pada Film “13 Bom di Jakarta” menurut perspektif teori ketergantungan.

KAJIAN PUSTAKA

Sebagaimana yang telah dipantik dalam paparan di atas, kami menggunakan teori dari Andre Gunder Frank sebagai pisau analisis dalam pembahasan Film “13 Bom di Jakarta”. Gunder Frank merupakan sosiolog berkebangsaan Jerman yang termasuk dalam jajaran tokoh ketergantungan. Frank dalam teori Pembangunan keterbelakangan banyak membahas bagaimana negara-negara dunia ketiga “*sengaja*” dimiskinkan atau dirancang lambat untuk berkembang oleh skenario kapitalisme. Frank dalam Budiman (2000) menyatakan, keterbelakangan bukan suatu kondisi alamiah dari sebuah masyarakat, bukan juga karena masyarakat itu kekurangan modal. Keterbelakangan merupakan sebuah proses ekonomi, politik dan sosial yang terjadi sebagai akibat globalisasi dari sistem kapitalisme. Keterbelakangan di negara-negara pinggiran adalah akibat langsung dari terjadinya pembangunan di negara-negara pusat. Hubungan yang tidak sehat antara negara pusat dengan negara pinggiran menjadi salah satu pokok pembahasan Frank dalam teori ketergantungan.

Frank dalam teorinya cenderung membahas mengenai aspek politik dari hubungan negara pinggiran (yang ia sebut sebagai negara satelit) dengan negara pusat (yang ia sebut sebagai negara metropolis). Dalam pemikirannya, ia membahas tentang hubungan antara modal asing dengan kelas-kelas yang berkuasa di negara pinggiran. sebagaimana yang kita tahu bahwa, tanpa adanya investasi yang masuk pada suatu negara, apalagi negara tersebut merupakan negara berkembang, maka ia akan sangat sulit dalam melakukan pembangunan. Dalam buku yang ditulis Arief Budiman (2000) dijelaskan, Dalam rangka mencari

keuntungan yang sebesar-besarnya, kaum bourjuasi di negara-negara metropolis bekerja sama dengan pejabat pemerintah di negara-negara satelit dan kaum bourjuasi yang dominan di sana. Sebagai akibat kerjasama antara modal asing dan pemerintah setempat ini, muncul lah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan modal asing dan bourjuasi lokal, dengan mengurbankan kepentingan rakyat banyak negara tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk membongkar realitas sosial yang ada pada fokus topik riset. Membentuk suatu penjabaran deskriptif atas temuan-temuan data. Kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif teoretis yang ada. (Sobur, 2009: 147). Sementara itu, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif, untuk menggambarkan fenomena-fenomena sosial yang sedang berlangsung. (Sugiyono, 2011 :69). Terutama dalam konteks tulisan ini, merupakan fenomena yang terkait dengan pembangunan.

Untuk jenis data, berdasarkan pendapat Parwito (2007), terdapat data primer dan sekunder. Data primer dalam tulisan ini adalah film berjudul "13 Bom di Jakarta", dengan berbagai fenomena sosial berbasis pembangunan ekonomi yang terdapat di dalamnya. Sementara itu, data sekunder yang digunakan ialah literatur-literatur yang memuat perspektif-perspektif teoretis dengan relevansi terhadap fokus yang hendak dibentuk pada bagian pembahasan. Di antaranya merupakan perspektif-perspektif teoretis yang mengacu kepada disiplin ilmu sosiologi yang menjabarkan tentang mekanisme pembangunan.

Unit analisis dalam penelitian ini, sebagaimana perspektif ketergantungan yang digagas oleh Andre Gunder Frank, menganggap peran pemerintah sangatlah penting dalam proses pembangunan di suatu negara. Selain itu, teknik pengumpulan data didapatkan melalui film yang menarasikan suatu fenomena sosial. Di antara sumber data dalam penelitian kualitatif, berasal dari pengamatan, wawancara, serta dari beberapa hal lainnya seperti karya seni, dokumen, dan teks. (Parwito, 2007:96). Film dapat didefinisikan sebagai suatu karya seni yang merupakan salah satu dari sumber data penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2011 : 240).

PEMBAHASAN

Film 13 Bom di Jakarta

Film “13 Bom di Jakarta” merupakan film yang diadaptasi dari kisah nyata. Film ini diproduksi oleh Visinema Pictures dan disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko. Sebagaimana yang telah dipantik sebelumnya, bahwa film ini mempertontonkan kelompok teroris yang melakukan teror karena muak dengan sistem yang korup. Kelompok yang dipimpin oleh mantan Mayor Komandan Batalyon Elite ini melakukan beberapa tindakan terorisme yaitu dengan melakukan pengeboman terhadap akses publik. Dalam *scene* awal, ditampilkan adegan pengeboman pada salah satu mobil van yang bertuliskan “PERCETAKAN UANG NEGARA” yang sedang mengangkut uang. Pada adegan tersebut terjadilah baku tembak antara aparat dengan kelompok teroris. Setelah baku tembak selesai, para kelompok teroris ini tidak mengambil uang yang ada di mobil *van*, dan malah dibiarkan untuk diambil oleh masyarakat sekitar. Adegan pengeboman kedua dilancarkan di Gedung Bursa Efek Jakarta. pengeboman ini terjadi ketika suatu lembaga yang dalam film itu dinamakan “Badan Kontra Terorisme Indonesia” berencana melakukan penyergapan terhadap kelompok teroris yang telah melakukan pengeboman pada mobil *van* sebelumnya, namun mereka tidak berhasil, malah mereka dipertontonkan aksi pengeboman Gedung Bursa Efek Jakarta. adegan pengeboman selanjutnya diluncurkan pada transportasi publik yaitu MRT. Pengeboman ini dilakukan akibat geramnya kelompok teroris karena istri dari salah satu anggota kelompok teroris tersebut ditangkap. Lalu teror selanjutnya diluncurkan di lokasi publik dan strategis, yaitu bandara.

Kecacatan Sistem

Berdasarkan isi film, kecacatan sistem perbankan dan pemerintahan menjadi titik tolak suatu kelompok melakukan aksi teror yaitu pengeboman. Dalam film tersebut terdapat beberapa adegan yang menjelaskan tentang bobroknya sistem perbankan dan pemerintahan. Salah satu peran dalam film tersebut menampilkan mantan komandan batalyon elite bernama Ismail alias Arok yang berperan sebagai pemimpin kelompok teroris. Ia bercerita kepada seorang pemateri seminar *crypto* yang sekaligus founder perusahaan jual beli *crypto* tentang masalah yang dihadapinya. Ia menjelaskan bahwa istrinya dulu tertipu oleh salah satu lembaga asuransi. Namun mereka masih bisa bertahan dan memperbaiki keadaan. Lalu terdapat seorang kawan yang menawari istrinya untuk ikut serta dalam koperasi yang bernama Koperasi Dana Surya. Akhirnya istrinya menjadi nasabah sekaligus sales yang menawarkan produk-produk hasil koperasi ke tetangga dan kawan-kawannya. Namun, ternyata koperasi tersebut terkena kasus penggelapan dana yang membuat istri dari mantan komandan ini disalahkan oleh banyak

orang. Lebih parahnya lagi, pejabat koperasi yang terkena kasus penggalapan dana tadi ditetapkan tidak bersalah di persidangan. Hal itu membuat sang istri depresi dan memutuskan untuk gantung diri. Keheranan pelaku yaitu mantan komando batalyon elite ini ditambah oleh meninggalnya anak mereka.

Selain itu juga ditampilkan adegan dimana salah satu anggota dari kelompok teroris ini bercerita tentang alasannya ingin menghancurkan sistem yang bobrok ini. anggota ini bernama waluyo, ia adalah orang yang berperan dalam bidang IT dalam kelompok tersebut. Ia bercerita kepada dua orang *founder* perusahaan jual beli *crypto* yang disekap oleh kelompok teroris ini. ia bercerita bahwa keluarganya hancur karena sistem perbankan, rumah mereka harus disita karena telat membayar KPR 3 bulan. Hal ini terjadi karena Waluyo terkena PHK dari pekerjaannya. setelah terjadi tersebut, ibu Waluyo memakai uang tabungannya untuk meng-investasikannya ke koperasi yang sama dengan koperasi yang diikuti Ismail, Koperasi Dana Surya. Kasus yang sama tentang penggalapan dana juga dialami oleh Waluyo. Setelah itu ibunya sakit dan meninggal. Ia berkata dalam dialognya "aku kehilangan semuanya, ga ada uang, ga ada rumah, ga ada ibu". peristiwa inilah yang menjadi awal Waluyo memiliki keinginan untuk menghancurkan kebobrokan sistem yang korup tersebut. Lalu ia mengenal ismail sebagai mantan militer, ia menyusun rencana untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah.

Sebagaimana paparan sebelumnya, kami menghubungkannya dengan teori Andre Gunder Frank mengenai keterbelakangan pembangunan. Frank dalam Budiman (2000) mengatakan, Kebijakan pemerintah yang didukung oleh bourjuasi lokal ini adalah kebijakan yang menghasilkan keterbelakangan, karena kemakmuran bagi rakyat jelata dinomor-duakan. Berdasarkan kutipan diatas, kami menganggap pihak koperasi sebagai bourjuasi dan fenomena ditetapkan tidak bersalahnya pejabat koperasi merupakan suatu kecacatan atau bobroknya sistem hukum dalam pemerintahan. Hal ini berhubungan dengan pernyataan frank yang telah ditulis di bagian sebelumnya, bahwa akibat kerjasama antara modal asing dan pemerintah setempat ini, muncul lah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan bourjuasi lokal dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Rosa (2021) juga menyatakan bahwa, Administrasi Birokrasi memiliki suatu kaitan yang erat dalam mendukung program pembangunan. Hal ini tentu membuat rasa tidak percaya kepada pemerintah dari masyarakat. Dan yang lebih menakutkan lagi timbul tindakan pemberontakan seperti aksi pengeboman dalam film "13 Bom di Jakarta".

Pengeboman sebagai Bentuk Revolusi

Aksi pengeboman yang ditampilkan dalam film “13 Bom di Jakarta” dapat dianggap sebagai sebuah bentuk revolusi. Sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Frank dalam Budiman (2000), Karena itu, perubahan yang diperlukan adalah yang langsung menuju pada sosialisme. Jadi, bagi Frank, keterbelakangan hanya bisa diatasi melalui revolusi, yakni revolusi yang melahirkan sistem sosialis. Tindakan teror berupa pengeboman yang dilakukan oleh kelompok teroris dapat dikatakan sebagai bentuk revolusi sosialis. Alasan mereka melakukan tindakan tersebut yaitu sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sistem yang korup. Terdapat suatu dialog yang berbunyi “Maka atas nama kemiskinan sistematis yang terjadi sepanjang hidup kita, kami melancarkan perlawanan terhadap ketidakadilan, oligarki, dan mafia keuangan. Keadilan akan ditegakkan dengan cara radikal, dan kesempatan setiap orang untuk setara dalam kehidupan ini harus dikembalikan.”. dialog diatas dapat dikatakan sebagai bentuk protes masyarakat terhadap pemerintah, dengan tujuan pemerintah dapat berbenah menjadi lebih baik. Aksi pengeboman ditujukan untuk mendistraksi pemerintah untuk segera berbenah dan tidak lagi menjalankan sistem yang korup tadi. Pembenaan pemerintah tentu berdampak positif bagi pembangunan dalam negeri.

Aksi pengeboman tentu memberikan dampak yang cukup krusial baik kepada hal yang sifatnya material maupun non material. Dampak yang ditimbulkan dari aksi pengeboman ini meliputi jangka pendek dan jangka panjang.

a. Jangka pendek

Dampak jangka pendek yang ditimbulkan dari aksi pengeboman ini dibagi lagi menjadi dua jenis, material dan non material. Kerugian material yang ditimbulkan seperti rusaknya infrastruktur publik, terganggunya akses publik, nyawa yang melayang, dan dana yang harus digelontorkan untuk mengganggu kerugian-kerugian tersebut. Selain kerugian material, kerugian non material juga ditimbulkan dari aksi teror ini. rasa takut penduduk juga merupakan dampak negatif bagi negara. Akibat rasa takut yang timbul secara tidak langsung memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat yang nantinya berpengaruh pada kegiatan produksi dan pertumbuhan ekonomi negara.

b. Jangka panjang

Dampak jangka panjang yang ditimbulkan dari aksi pengeboman ini yaitu mempengaruhi investasi yang datang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembangunan sedikit banyak dipengaruhi oleh investasi yang datang di suatu negara. Mengutip pernyataan Frank kembali dalam Budiman (2000), apabila tidak memanfaatkan investasi eksternal, mereka harus membangun kekuatan produksi sendiri yang membutuhkan modal besar dan teknologi

canggih. Mereka juga harus berjuang keras untuk mendapatkan pangsa pasar bagi produk mereka di pasar dunia, pada saat pasar dunia sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multi nasional. Bila jalan ini yang ditempuh, kemungkinan berhasilnya sangat kecil. Dalam konteks topik yang sedang dibahas, aksi pengeboman membuat investor takut untuk menanamkan modalnya ke dalam negeri yang berakibat pada terhambatnya atau bahkan tertinggalnya pembangunan di negara tersebut. Menurut Rosa (2022), untuk menggapai tujuan tersebut, dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan, diperlukan suatu pertumbuhan ekonomi yang konstan. Investasi pun menjadi suatu landasan bagi ke berlangsungnya pembangunan berkelanjutan di era kontemporer ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, kebijakan atau ketetapan yang dibentuk pemerintah tidaklah selalu menghasilkan suatu hal yang baik bagi kalangan bawah (masyarakat miskin). Terkadang kebijakan atau ketetapan tersebut bisa menimbulkan tombak tajam yang merugikan masyarakat. Seperti yang digambarkan pada film "13 Bom Di Jakarta" suatu sistem yang bobrok akan menghasilkan *impact* yang besar bagi negara itu sendiri. Masyarakat yang sudah muak dengan cacatnya hukum ataupun yang lainnya akan menimbulkan dendam terhadap pencipta sistem itu sendiri (pemerintah). Ketika masyarakat sudah banyak yang menjadi korban dari sistem yang buruk, tidak menutup kemungkinan akan adanya protes terhadap pemerintah. Tindakan pengeboman merupakan tindakan dari bentuk protes terhadap pemerintah. Pengeboman dilakukan diberbagai titik vital pertumbuhan ekonomi yang dimaksudkan dapat mempengaruhi produktifitas ekonomi di wilayah tersebut. dengan dilakukannya pengeboman terhadap fasilitas publik dimana tempat tersebut menjadi akses yang di gunakan masyarakat sehari hari akan mengambat mobilitas penduduk sekitar yang ingin menjalankan aktifitas ekonomi, seperti berdagang, berangkat bekerja ataupun menjalankan transaksi yang lainnya. Bukan hanya mobilitas yang terhambat, gangguan psikologis masyarakat juga akan terganggu mengingat titik bom di letakkan pada tempat yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat ketika akan menggunakan fasilitas publik. Dari pemberontakan ini juga akan meghambat adanya invenstor asing yang masuk. Kurangnya investor yang masuk akan memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan negara dalam berbagai macam aspek terutama pada peningkatan produktivitas ekonomi suatu negara. Jika di tinjau lebih lanjut seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwasanya investor akan takut untuk menanamkan modal pada negara mengingat negara tersebut akan mengalami perlambatan laju pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, A. (2000). Teori pembangunan dunia ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Pawito. (2007). Penelitian komunikasi kualitatif. Yogyakarta: LKiS.

Rosa, D. (2021). Editor's introduction: Beyond the aporia of development projects. *Journal of Contemporary Sociological Issues*, 1(2), i-v. <https://doi.org/10.19184/csi.v1i2.26767>

Rosa, D. (2022). Editor's introduction: Sustaining global development. *Journal of Contemporary Sociological Issues*, 2(2), i-iv. <https://doi.org/10.19184/csi.v2i2.33804>

Sugiyono. (2011). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Bandung: Alfabeta.